

**SOCIAL TRUST MASYARAKAT ACEH TENGGARA TERHADAP
PARTAI ACEH (PA)**

(Studi Persepsi Masyarakat Aceh Tenggara)



Oleh:

**Mustapa Kamil Alga Beruh
NIM: 17200010168**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Penelitian Selajutnya
Program Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Kartika Sari, SIP
NIM : 17200010037
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Fitri Kartika Sari, SIP

NIM: 17200010037

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Kartika Sari
NIM : 17200010037
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Fitri Kartika Sari, SIP

NIM: 17200010037



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PERPUSTAKAAN DALAM MENGATASI LIBRARY ANXIETY PADA MAHASISWA DI PERPUSTAKAAN DIGITAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI KARTIKA SARI, SIP
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010037
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

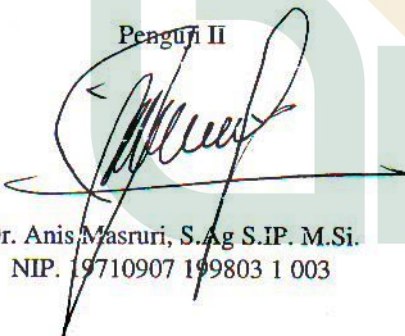
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Roma Ulinuha, S.S., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002

Penguji II



Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
NIP. 19710907 199803 1 003

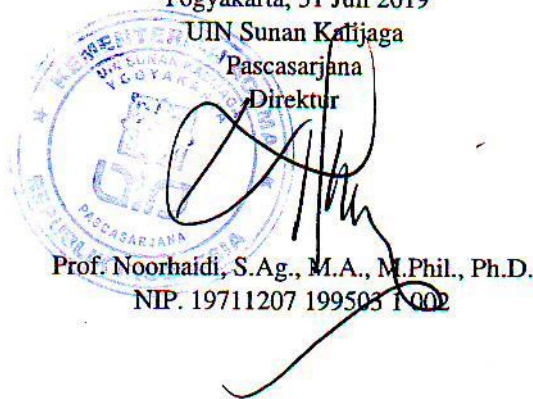
Penguji III



Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
NIP. 19700403 200312 1 001

Yogyakarta, 31 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktur



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**UPAYA PERPUSTAKAAN DALAM MENGATASI *LIBRARY ANXIETY*
PADA MAHASISWA DI PERPUSTAKAAN DIGITAL UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA**

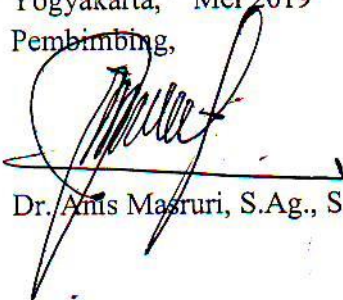
Yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Kartika Sari, SIP
NIM : 17200010037
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2019
Pembimbing,



Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.IP., M.Si

ABSTRAK

Memorandum of Understanding atau MoU di *Helsinki* Finlandia telah memberikan jalan baru yaitu menuju demokratisasi di Indonesia dan Aceh pada khususnya. Implementasi MoU yang melahirkan UUPA yaitu No.11 tahun 2006 dan PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Partai politik lokal diharapkan menjadi jalan baik bagi perubahan Aceh dan transformasi bagi tujuan politik GAM serta terbukanya ruang demokrasi seluas-luasnya dalam proses politik sehingga tetap dalam lingkaran NKRI. Dan juga bertujuan untuk mengiring masyarakat aktif dalam partisipasi politik. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena melihat pada histori dan dinamika berpolitikan di masyarakat Aceh. partai politik lokal Aceh pada mulanya hanya ada 1 partai lokal, yaitu Partai Aceh (PA), sehingga bertambah menjadi 6 partai lokal. Yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Pada tahun 2009, jumlah partai lokal di Aceh ada 4 partai lolos dalam verifikasi oleh KPU ikut berkompetisi di pemilihan umum. Namun di tahun 2014, yang ditetapkan oleh KPU pusat hanya berjumlah 3 partai lolos untuk berkompetisi. 2018 partai yang ditetapkan 4 partai akan berkompetisi 2019, bertambah 1 partai.

Namun, penelitian ini melihat modal sosial apa yang sudah dilakukan oleh PA dalam menjalankan tugasnya sebagai partai politik di demokratisasi Aceh, khususnya persepsi masyarakat desa Kuta Lang-Lang kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap PA. *Social trust* PA sangat penting, tentunya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memilih PA sebagai representasi masyarakat Aceh. Metode dalam penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif. Juga tidak terlepas melihat dari fragmentasi politik masyarakat Aceh selama ini, juga bagaimana hubungan historisitas mempengaruhi politik di Aceh, seperti hubungan antara Darul Islam (DI), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Partai Aceh (PA) dan Ulama dalam politik Aceh.

Dalam temuan pada penelitian ini, partai politik lokal tersebut belum mampu menunjukkan *performance* memuaskan bagi masyarakat Aceh. Sehingga tidak jarang kekecewaan masyarakat desa Kuta Lang-Lang terhadap PA. Juga temuan dalam penelitian ini yaitu beberapa indikator yang mempengaruhi terhadap berkurangnya pemilih PA tersebut. *Pertama*, konflik internal PA. *Kedua*, politisasi syariat Islam. *Ketiga*, fragmentasi politik masyarakat, dan skeptis masyarakat Aceh terhadap PA. Dan temuan selanjutnya adalah syariat Islam sebagai politik utopia untuk mendapat legitimasi kekuasaan oleh PA. Syariat Islam dianggap notabene sebagai modal sosial dari produk kebijakan PA oleh masyarakat. Padahal para petinggi GAM sebagian latar belakang pendidikannya tidak mengetahui tentang syariat Islam bahkan lama tinggal di eropa. Dilihat pada awal mula PA melakukan perlawanan terhadap RI, syariat Islam bukanlah bagian dari platform dalam perjuangan GAM hingga menjadi Partai lokal PA. Hingga sampai sekarang PA menjadikan syariat Islam sebagai modal sosial dan landasan politik untuk mendapatkan legitimasi nya di masyarakat Aceh. Artinya PA mengalami pergeseran orientasi dan juga gagal dalam memahami

falsafah para pendahulu Aceh yaitu tentang nasionalisme keAcehan dan keIndonesian.



ABSTRACT

The Memorandum of Understanding or MoU in Helsinki Finland has provided a new path towards democratization in Indonesia and Aceh in particular. The implementation of the MoU that gave birth to the constitutional intern of government Aceh was No.11 in 2006 and PP No. 20 of 2007 concerning Local Political Parties in Aceh. Local political parties are expected to be a good path for Aceh's transformation and transformation of GAM's political goals and opening up the widest possible democratic space in the political process so that it remains in the circle of the Republic of Indonesia. And also aims to accompany the active community in political participation. This research is very important because it looks at the history and dynamics of politics in Acehnese society. Aceh's local political parties initially only had one local party, the Aceh Party (PA), so that it increased to 6 local parties. Namely the Aceh Aman Sejahtera Party (PAAS), the Aceh Sovereignty Party (PDA), the Aceh Independent People's Voice Party (SIRA), the Aceh People's Party (PRA), the Aceh Party (PA) and the Aceh United Party (PBA). In 2009, the number of local parties in Aceh, 4 parties passed the verification by the KPU to compete in the general election. But in 2014, determined by the central KPU, only 3 parties passed to compete. 2018 parties that are determined by 4 parties will compete in 2019, increasing by 1 party.

However, this study looks at what social capital has been carried out by PA in carrying out its duties as a political party in Aceh's democratization, specifically the perception of Kuta Lang-Lang villagers in Babel sub-district, Southeast Aceh Regency of PA. PA social trust is very important, of course, to get support from the community to choose PA as a representation of the people of Aceh. The method in this research is qualitative research. It also can not be separated from the political fragmentation of the Acehnese people so far, also how the relationship of historicity affects politics in Aceh, such as the relationship between Darul Islam (DI), the Free Aceh Movement (GAM), the Aceh Party (PA) and Ulama in Aceh politics.

In the findings of this study, the local political parties have not been able to show satisfactory performance for the people of Aceh. So it is not uncommon for the disappointment of Kuta Lang-Lang villagers towards PA. Also the findings in this study are several indicators that influence the reduction in the PA voter. First, internal PA conflict. Second, the politicization of Islamic law. Third, the political fragmentation of the people, and the skepticism of the people of Aceh towards the PA. And the next finding is Islamic law as a political utopia to get the legitimacy of power by the PA. Islamic Sharia is in fact considered social capital from PA policy products by the public. Even though GAM officials have some educational background, they do not know about Islamic Sharia, even if they have long lived in Europe. Seen at the beginning, the PA resisted RI, Islamic law was not part of the platform in GAM's struggle to become a local PA party. Until now the PA has made Islamic law as a social capital and political foundation to get its legitimacy in the people of Aceh. This means that the PA experiences a shift in orientation

and also fails to understand the philosophy of the predecessors of Aceh, namely about the nationalism of Godliness and Indonesian.

MOTTO

Perjuangan masih panjang, maka berjuanglah dan berharap mendapatkan ridho Illahi rabi.

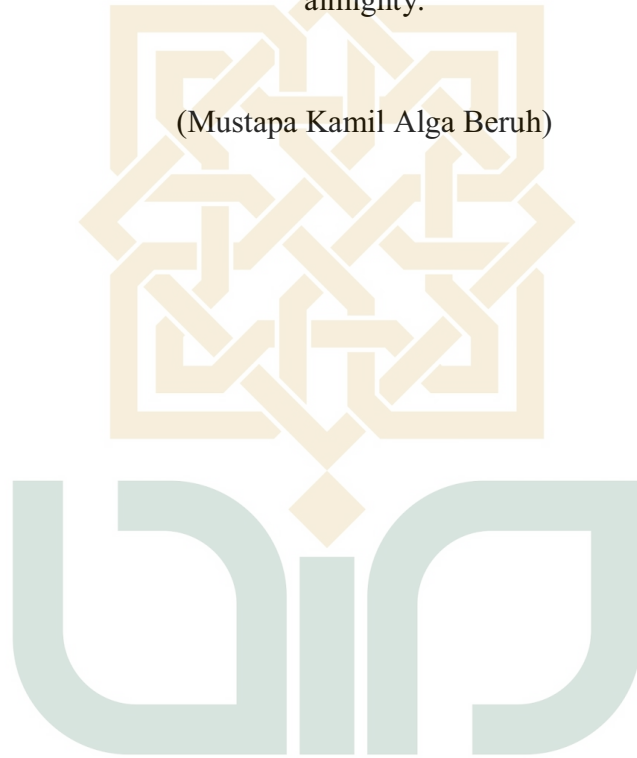
Dunia hanya titipan, bagaikan sebuah skenario dari tuhan maka yakinlah setiap kita punya peran dalam menjalankan skenario itu.

Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving

Albert Einstein

Anyone who wants justice, then must be considered and true, because god is almighty.

(Mustapa Kamil Alga Beruh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini dipersembahkan untuk

Ayahanda Rajimin dan Almarhumah Ibunda Tercinta Sarimah Binti Abdul Manaf

Semua Keluarga Besar yang mendukung secara moril dan materil



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah ke zaman yang penuh dengan ilmu dan Islamiyyah, juga kepada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai di hari kiamat.

Dalam penyusunan Tesis yang berjudul “Social Trust Masyarakat Aceh Tenggara Terhadap Perkembangan Partai Aceh PA (Studi Persepsi Masyarakat Aceh Tenggara).” Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati peneliti banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Yudian, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Rof'ah, M.Sw., M.A., Ph.D selaku Koordinator Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Norma Permata, S.Ag., MA., Ph.D selaku Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, semangat, ilmu dan dorongan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sampai terselesainya penulisan Tesis ini.
5. Segenap Dosen, Staff, dan Karyawan Program Pascasarjana serta Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Rajimin dan Ibu Almarhumah Sarimah Binti Abdul Manaf selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak mendoakan beserta Sri Tawarati, S.pd. (Kakak Wo) kakak pertama, Eli Sumarlina, S.pd. (Kakak ngah) kakak kedua dan Saddam Husein, S,Th.I., M,Th.I. selaku Abang (Wo) abang paling besar anak nomor tiga atau saudara/i kandung yang telah mendoakan, demi kelancaran aktivitas akademik selama di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Keluarga Besar dari Pihak Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moril dan materil, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan S2 ini dengan baik.
8. Bangda Sapri Selian. selaku sekretaris DPW-PA Aceh Tenggara beserta seluruh pengurus, dan jajarannya yang telah membantu penyusunan Tesis ini.
9. Teman-teman IPKP angkatan 2016 Program IIS beserta seluruh lintas angkatan IPKP, semoga Konsentrasi ini semakin maju, berkembang dan

terus berjaya membawa manfaat serta maslahat bagi nusa, bangsa dan agama.

10. Ikatan Masyarakat dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IKAMARA) Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, sekaligus perhatian dalam menyukkseskan penelitian saya.
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Peneliti menyadari akan kekurangan dan kelemahan Tesis ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Meskipun demikian, harapannya

Tesis ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya sekaligus menjadi kontribusi dalam literatur keilmuan pengetahu bagi penelitian civitas akademik. Akhirnya semua hanya kepada Allah SWT-lah peneliti kembalikan. Semoga segala amal usaha senantiasa mendapatkan ridho-Nya, amien.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

Penyusun

Mustapa Kamil Alga Beruh S.Sos

NIM. 17200010168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
POLITIK MASYARAKAT ACEH.....	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Hubungan Sejarah Darul Islam, Gerakan Aceh Merdeka dan Partai Aceh	27
C. Peran Ulama Dalam Pembentukan PA.....	50
D. Upaya Untuk Perdamaian	59
E. Penutup	73
BAB III.....	76
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ACEH.....	76
A. Pendahuluan.....	76

B. PA Syariat Islam Sebagai Modal Sosial	76
C. PA Mensupport Kegiatan	83
D. Relawan PA di Masyarakat	87
E. PA dalam Proses Menampung juga Penerapan Aspirasi Masyarakat.....	89
F. Proses Sosialisasi PA di Masyarakat.....	91
G. Program-Program PA di Masyarakat	93
H. Peran Non Organisasi Partai di Masyarakat	95
I. Penutup	96
BAB IV	98
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ACEH	98
A. Pendahuluan.....	98
B. PA dan Pengaruhnya di Masyarakat	99
C. Faktor-Faktor Perpecahan PA.....	104
1.1 Konflik Internal PA.....	104
1.2 Fragmentasi Politik Masyarakat	113
1.3 Politisasi Syariat Islam	115
D. Prilaku Politik PA di Desa Kuta Lang-Lang	123
E. Peran Organisasi PA di Masyarakat.....	134
F. Penutup	135
BAB V.....	137
PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148
LAMPIRAN	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses dinamika perjuangan mendapatkan keistimewaan dan otonomi Daerah Provinsi Aceh (DPA) tidak begitu mudah, lahir dari konflik yang begitu berkepanjangan di bumi Aceh, dimulai pada masa Daud Beruh sampai ke perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di prakarsai oleh Hasan Tiro.¹ Namun konflik yang terjadi Aceh telah lama mendarah daging hingga menyebabkan korban yang tidak sedikit. Sehingga diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Puteri.²

Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengambil hikmah atas bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 untuk melakukan dialog dengan gerakan separatisme Aceh merdeka untuk mengakhiri kisruh antara GAM dan Republik Indonesia (RI), namun GAM tetap bersikeras untuk meminta Aceh merdeka dan pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kepiawaian Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya terwujud sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara dua pihak. Sebagai delegasi menuju perdamaian pada saat itu wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai perwakilan dari pihak RI, dalam perdamaian lahirlah sebuah keistimewaan otonomi khusus

¹Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publisbing, 2014), 16.

²Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, (LabSosio, Pusat Kajian Sosiologi Fisip UI, Agustus 2015), 88-89.

bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh Darulssalam yang sekarang menjadi provinsi Aceh.

Kebijakan tersebut adalah sebagai solutif dari kisruh internal (*Internal Chaos*) dinegeri ini menurut Yusuf Kalla. Dalam penandatanganan MoU 15 Agustus 2005 antara pemerintah RI dan GAM di *Helsinki, Finlandia*.³ Ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi dan perdamaian di Aceh. Pada penerapan MoU tersebut telah menghasilkan Undang-undang (UU) No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh.⁴ Menurut Saddam Husien pengamat politik lokal Aceh, keberadaan partai politik lokal di Aceh akan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah lebih baik. Partai politik lokal tersebut diharapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi dan juga sebagai representatif masyarakat secara lebih tepat, mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.⁵

Partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat Aceh untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik. Serta digunakan untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam proses formulasi kebijakan-kebijakan publik yang mana selama ini masih dianggap kurang produktif

³Michael Morfit, "Aceh pasca tsunami dan pasca konflik" *Mengelola Risiko Aceh, kesepakatan Helsinki, dan perkembangan demokratis Indonesia*, Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), terj. Arif B. Prasetyo (Bali-Jakarta, 2012) 15-16.

⁴M.Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*. (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2015), 410.

⁵Saddam Husien dalam Seminar Nasional, Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Universitas Gunung Lauser, dengan tema "Peran Pungsi Pemuda dalam Membangun Aceh," pada Tanggal 02 Mei 2017.

dalam pembangunan di Aceh, khususnya Aceh pasca konflik yang masih di katagorikan jauh ketinggalan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya.

Pada tahun 1970 sampai 2006, Aceh menjadi salah satu daerah dan provinsi termiskin di Indonesia. Menurut data *World Bank* dan Biro Pusat Statistik (BPS) Aceh akibat konflik berkepanjangan dan di tambah lagi tsunami pada tahun 2004.⁶ Pada 2004 angka kemiskinan sebanyak 8, 89 persen menurun hingga 8, 03 persen pada 2013. Angka pengangguran juga mengalami penurunan cukup drastis dari 10, 10 persen menjadi 8, 5 persen.⁷ Namun bila di dibandingkan dengan dana bantuan dan anggaran yang masuk ke Aceh tidak sebanding dengan persentasi tersebut, seharusnya Aceh sudah selayaknya maju seperti daerah lainnya, bahkan lebih jika memang pemerintah politik serius dalam mengelola dana tersebut.

Menurut rektor universitas Malikussaleh Aceh Utara, prof. Apridar menyatakan, dalam konteks keamanan, Aceh sudah jauh lebih kondusif. Namun, sektor kemiskinan patut dibenahi. Salah satu esensi MoU adalah mengentaskan kemiskinan dalam pelukan perdamaian. Sedangkan angka pengangguran mencapai 7 persen dari jumlah penduduk 5 juta jiwa lebih di provinsi Aceh. Jika di lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) kita tahun 2017 terdapat sekitar 14 triliun. Itu angka yang besar dan sejatinya bisa digunakan

⁶World Bank, "*Dampak Konflik, Tsunami dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh*," 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, Amerika Serikat. Telp: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email: feedback@worldbank.org Website: www.worldbank.org. Januari 2008.

⁷Republika.co.id tentang data pertumbuhan ekonomi Daerah Aceh, Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyatakan terus mengalami peningkatan.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/14>, Diakses pada Tanggal 27 Februari 2019.Pukul 19.00-23.20 Wib.

untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Aceh.⁸ Karena selama ini pemerintah pusat dinilai tidak agresif dan serius dalam menangani permasalahan yang sangat krusial tentang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan lainnya di Aceh. Maka dengan adanya partai politik lokal Aceh ini seharusnya mampu mewujudkan demokrasi di Aceh dengan baik, demikian juga Akan mempunyai relasi baik dengan masyarakat Aceh untuk mencapai perdamaian.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, dalam sistem politik Indonesia.⁹ Karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya *The Degree of Institutionalization* dalam setiap sistem politik yang demokrasi.¹⁰

Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi, politik, sosial dan lainnya yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus. Maka untuk menyerap dan menyampung kepentingan masyarakat

⁸Kompas.com, "Setelah 12 Tahun Perdamaian, Aceh Masih Dihantui Kemiskinan, <https://regional.kompas.com/read/2017/08/15/12460721/setelah-12-tahun-perdamaian-aceh-masih-dihantui-kemiskinan>. Penulis: Masriadi, diakses pada 28 Februari 2019. Pukul 23.00-01.20 Wib.

⁹Peraturan.co.id, Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 "*Tentang Partai Politik*." Diakses pada 12 Januari 2019, pukul 19.20.20.00.Wib.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 401.

Aceh, penting dibentuk sebuah partai yang dianggap sebagai representatif politik masyarakat Aceh.

Pimpinan politik GAM Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad pada mulanya untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Yang sekarang ini cikal bakal Partai Aceh (PA), yang mana dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (Partai GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Pada Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47 persen kursi yang tersedia namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 26 kursi dari 81 kursi, artinya mengalami penurunan yang begitu drastis.¹¹

Pada perkembangan dinamika politik masyarakat Aceh sangat jelas sehingga relasi dan implikasinya sangat berpengaruh terhadap terjadinya politik dimasyarakat. Pada mulanya partai politik lokal Aceh ada 1 partai saja yaitu Partai Aceh (PA), sehingga bertambah menjadi 6 partai yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Tesis ini juga melihat dinamika bertambahnya jumlah partai politik lokal di Aceh tersebut, dan bukan semena-mena berkembang begitu saja melainkan ada persoalan dimasyarakat dalam menilai partai lokal tersebut, sehingga partai politik tersebut jumlahnya naik turun. Namun pada pemilihan umum belakangan ini

¹¹Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh. "Partai Aceh." Diakses pada tanggal 27. Februari, 2019. Pukul 23.00 Wib.

partai lokal di Aceh mengalami penurunan jumlahnya yang lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dampak dari penurunan tersebut dimungkinkan dengan beberapa alasan yaitu pertama, terhadap peraturan perundang-undang partai politik, kedua politisasi syariat Islam. Dan juga tidak mampu berkompetisi dengan partai nasional lainya dan ketiga kurangnya dukungan dari masyarakat Aceh sendiri dikarenakan skeptisme (tidak percaya) terhadap partai lokal tersebut, sehingga di beberapa daerah yang dulunya di kuasai oleh partai lokal beralih partai nasional, baik legislatif dan eksekutif.

Dilihat dari jumlah partai politik lokal pada tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU hanya berjumlah 3 partai politik lokal saja.¹² Begitu juga pada tahun 2018 yang lalu penetapan partai lokal Aceh kembali dalam berkompetisi 2019 hanya berjumlah 4 partai lokal saja, bertambah 1 partai yaitu PA, Partai, SIRA, PDA dan PNA.¹³ Artinya partai politik lokal Aceh belum menunjukkan *performance* yang memuaskan sesuai dengan utopia politik masyarakat Aceh walaupun politik masyarakat semakin jelas dengan terjadinya pemisahan partai politik yang semulanya 1 partai saja menjadi bertambah.

Tesis ini beragumen bahwa, terdapat kecenderungan masyarakat yang meningkat terhadap ketidak percaya kepada partai politik lokal Aceh yang berhubungan erat dengan berbagai isu sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Apabila jika dilihat fakta bahwa proposisi partai politik lokal yang mengalami

¹²Viva.co.id, *Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014*, <http://nasional.news.viva.co.id>. Diakses pada 12 Januari 2019, Pukul 10.20. Wib.

¹³Kompas.com, *Nomor urut empat partai politik lokal Aceh di pemilu 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/08562741/ini-nomor-urut-empat-partai-lokal-aceh-di-pemilu-2019>. Diakses pada 27 Februari 2019, Pukul 14.20. Wib.

kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal semakin signifikan jumlahnya.

Tesis ini berkontribusi terkait bagaimana persepsi masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal antara GAM dan Pemerintah Indonesia, namun hadirnya partai politik lokal Aceh dan kepercayaan sosial (*Social Trust*) terhadap partai politik lokal tersebut yang semakin tahun semakin berkurangnya jumlahnya, bahkan terdapat di dari hasil pemilihan umum PA yang mendominasi dari hasil pemilihan di tahun 2009, 2014 di kini malah sebaliknya di Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya memperoleh suara di pemilihan umum 15 persen saja. Yang dimaksud *social Trust* disini adalah keterlibatan masyarakat akan menjaga kepercayaan umum karena jaringan tersebut akan mengancam individu-individu yang mementingkan diri sendiri, sehingga menjadi modal sosial dalam membangun secara kolektif. Kenapa *social trust* penting disini menurut saya adalah, membangkitkan suatu adanya pola hubungan sosial inilah yang menjadi dasar untuk mengatasi masalah secara kolektif. Dengan demikian, modal sosial salah satu sumberdaya sosial yang ada di masyarakat. Ketika masyarakat menyadari pentingnya sumberdaya sosial ini digunakan, maka akan membuat pembangunan menjadi efektif dan efisien.

Yang paling menjadi dasar untuk mendeskripsikannya adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap partai politik lokal dalam memperbaiki kembali kesejahteraan masyarakat Aceh pasca konflik, untuk memperoleh informasi dari tesis ini akan ditempuh melalui penelitian langsung di masyarakat desa Kuta Langlang yang dianggap lebih tepat sebagai penelitian dan representatif dari

masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal masyarakat Aceh pasca konflik, ditengah diskursus kebijakan yang melingkupinya terhadap perkembangan dan pembangunan sosial politik masyarakat Aceh Tenggara.

Dengan demikian menyadari bahwa masih banyak permasalahan tentang partai politik lokal Aceh pasca konflik upaya untuk memperoleh informasi terkait apakah partai politik lokal Aceh perkembangannya di masa sekarang ini dan dimasa akan datang dapat diketahui melalui diskusi dan pandangan para praktisi dan pengamat politik di Indonesia. Interpretasi dan persepsi masyarakat sangat diperlukan dalam analisis terkait kebijakan tentang hadirnya partai politik lokal dan pengaruhnya dalam pembangunan Aceh juga kepercayaan sosial dan persepsi masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal pasca konflik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PA terhadap masyarakat Aceh Tenggara?
2. Tindakan politik apa saja yang sudah di lakukan oleh PA dalam membangun Aceh Tenggara?
3. Bagaimana Persepsi masyarakat Aceh terhadap PA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang partai politi lokal di Aceh
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang PA

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kepercayaan sosial dan persepsi masyarakat terhadap PA.

D. Kajian Pustaka

Secara Substansi kajian pustaka adalah bertujuan untuk menguatkan beberapa penemuan yang peneliti temukan, baik dari sisi teori, metodologi, pendekatan ataupun sisi lainnya yang tidak sama dengan penelitian yang terdahulu tentunya. Pada pengamatan pra penelitian oleh penulis sendiri melihat persoalan partai politik lokal Aceh tersebut, secara historisitas, hingga proses negosiasi, perjalanan legitimasi pada kebijakan partai politik lokal hasil MoU antara gerakan GAM dan Pemerintah Indonesia.

Menarik untuk diteliti bahwa ternyata masyarakat tidak hanya melihat kinerja partai politik yang berada dipusat (partai politik nasional) tetapi justru melihat pula kinerja partai politik didaerahnya (partai lokal) sebagai dari hasil kebijakan pemerintah. Bahwa kinerja partai nasional dan lokal tersebut harus berpedoman dalam rangka menjalankan tujuan, fungsi dan perannya sebagai partai politik, walaupun kajian dan diskusi mengenai partai politik memang telah banyak disampaikan dalam literatur.

Setelah mengadakan pra penelitian yaitu pengamatan dan penelusuran mengenai persepsi dan kepercayaan sosial masyarakat Aceh Tenggara di desa Kuta Lang-lang Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh, menemukan beberapa hal yang sangat relevan bila di tinjau dari kajian pustaka yang mempunyai kaitanya dengan penelitian ini.

Pertama buku Murizal Hamzah, dengan judul “Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh” Secara garis besar, buku ini terdiri dari tiga bagian. (1) Mengupas perjalanan Hasan Tiro pulang kembali ke Aceh tahun 2008 hingga wafat tahun 2010. Bagian (2) mengupas sosok Hasan Tiro Sejak lahir, sosok republikan pada masa revolusi 1945, kemudian memilih berseberangan dengan Republik Indonesia, mengirim surat protes ke Indonesia dan lain-lain. Terakhir, bagian (3) merangkum aktivitas Hasan Tiro dan GAM. Pertanyaan yang sering dilontarkan, apakah Hasan Tiro mendirikan GAM karena tidak mendapat proyek PT. Arun LNG di Aceh Utara? Apa alasan alumnus Columbia University bergerilya di rimba Aceh hingga berjuang ke Stockholm? Hinga Kisah selanjutnya pada sayap militer GAM, pelatihan militer di Libya hingga penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.¹⁴

Kedua Jurnal M.Rifqinizamy Karsayuda, dengan Judul “Partai politik lokal di negara kesatuan: Upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik” 2 juni 2011. Masalah yang dikaji oleh Karsayuda adalah, (1) Gagasan tentang partai politik lokal yang dilatar belakangi oleh diperkenankannya pembentukan Partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam (NAD) yang diberikan otonomi khusus (*special autonomy policy*) sebagaimana diperuntukkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga mempengaruhi daerah lainnya untuk mengembangkan partai politik lokal, secara emosional mungkin sama seperti di Aceh (2) Dalam konteks yuridis, yaitu pembentukan

¹⁴ Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publisbing, 2014), 16.

partai politik lokal di Indonesia masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU tersebut memuat beberapa peraturan yang belum memungkinkannya dibentuk partai politik lokal, dimana salah satu syarat pembentukan Partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d UU No.2 tahun 2008.¹⁵

Ketiga buku Abdul Muktie Fadjar, *partai politik dalam perkembangan sistem kenegaraan Indonesia*, masalah yang dikaji oleh Fadjar adalah, (1) MoU RI dan GAM yang terkait dengan partai politik lokal di Aceh kemudian di akomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di undang-undangkan pada 1 Agustus 2006. Hinga melahirkan UU-PA, (2) Munculnya gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada tahun 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan dan mengikuti pemilihan umum pada tahun itu.¹⁶

Keempat buku Miriam Budiarmo, dengan judul “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Masalah yang dikaji oleh Budiarmo adalah tentang psikologi sosial, (1) faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong manusia (individu) untuk berperan

¹⁵ Junal M.Rifqinizamy Karsayuda, “Partai politik lokal di negara kesatuan” *Upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Desember 2010. Post pada 2 juni 2011,

¹⁶ Abdul Muktie Fadjar, *partai politik dalam perkembangan sistem kenegaraan Indonesia*, (Malang: In-Trans Publishing 2006).

dalam ikatan kelompok atau golongan, juga psikologi sosial menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan tidak resmi (*Informal leadership*) turut menentukan hasil sesuatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan, (2) selain memberikan pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan, psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing ataupun berlawanan dengan consensus masyarakat, mengenai gejala sosial tertentu (3) sumber kekuasaan dalam pandangan Budiarto, yaitu dapat juga bersumber berupa kekayaan, misalkan seorang penguasa kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau bawahan yang mempunyai utang dan kekuasaan juga dapat bersumber pada kepercayaan atau agama. Seperti dibanyak tempat seorang alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan di tempat itu.¹⁷

Kelima Jurnal Kusumastuti, dengan judul “modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur”, masalah yang dikaji oleh Kusumastuti adalah tentang (1) modal sosial, peran modal sosial ini dijadikan sebuah kekuatan dalam merespon situasi diluar diri mereka, yaitu sebuah kapasitas adaptasi. Kekuatan atau kemampuan kolektif inilah yang kemudian ditransformasikan dalam upaya memobilisasi sumber daya alam dan manusianya serta memodifikasi norma dan kelembagaan yang ada di masyarakat sehingga tercipta sebuah daya lenting masyarakat. Dalam

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998).

proses pembangunan infrastruktur berupa jalan misalnya adalah merupakan modal sosial berupa interaksi yang kuat antar sesama warga berkembang. Interaksi ini menghasilkan kapasitas adaptasi berupa kerja sama, partisipasi tenaga, waktu, dan materi, serta pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Kapasitas adaptasi dikembangkan dengan memobilisasi sumber daya kelompok dengan memanfaatkan Kebaktian Rukun Warga (KRW) atau masyarakat sosial di desa.

(2) Modifikasi kelembagaan yang dilakukan adalah penunjukan seorang anggota kelompok untuk dijadikan orang kepercayaan untuk mengelola iuran listrik. Pada contoh kasus di atas mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk modal sosial berupa *social trust*, interaksi, dan kerja sama antara anggota kelompok menjadi kekuatan untuk merespon secara bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat melalui modal sosial terikat tersebut tentunya dapat mewujudkan daya lenting atau lebih baik lagi disosial kemasyarakatan Desa, fleksibilitas, dan stabilitas dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa.¹⁸

Keenam, buku Jimly Asshidiqie dengan judul, “konstitusi dan konstutualisme Indonesia”, masalah yang dikaji oleh Asshidiqie adalah tentang, (1) hukum dan persoalan syari’at Islam dengan pandangan pragmatis yaitu tentang hukum negara dan hukum agama atau keyakinan Di samping itu, pandangan pragmatis ini bisa juga terjerumus ke dalam kesimpulan yang negatif karena terlalu melebih-lebihkan pertimbangan pentingnya memelihara persatuan dengan (apabila perlu)

¹⁸ Kusumastuti, *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat PerDesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur*, Jurnal Sosiologi, 2015.

mengorbankan kebenaran. Terdapat pula varian pendapat yang menyatakan bahwa urusan syari'at Islam itu tidak seharusnya dituangkan secara formal dalam konstitusi, semata-mata karena hal itu dinilai cukup, diatur saja dalam kehidupan pribadi penganutnya. Oleh sebab itu, cukuplah rumusan seperti yang ada sekarang dengan menentukan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti dalam rumusan pasal 29, UUD 1945. Namun, pandangan terakhir ini dapat terjebak dalam logika sekularisme yang berusaha memisahkan secara tegas persoalan-persoalan kenegaraan dari persoalan keagamaan. Urusan agama dianggap tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari soal-soal kenegaraan. Sebabnya ialah para pengelola negara adalah juga manusia biasa yang juga terikat dalam berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga norma agama. Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang dipermaklumkan sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung dalam sejarah. Di satu segi nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pribadi para penyelenggara negara turut mempengaruhi materi dan proses pengambilan keputusan di tingkat kenegaraan. Dalam contoh paling mutakhir, misalnya, lihatlah kenyataan yang mempengaruhi Presiden George W. Bush ketika mereaksi terjadinya peristiwa yang menimpa gedung kembar *World Trade Center* tanggal 11 September 2001. Tanpa sadar, George W. Bush mengaitkan upaya memerangi

terorisme di balik peristiwa itu dengan perkataan “*the second crusade*” (perang suci kedua) setelah perang suci pertama yang dikenal dalam catatan sejarah di masa lampau antara kaum Muslimin dengan bangsa-bangsa *Eropa* yang beragama Nasrani.¹⁹

Ketujuh jurnal Muhammad Ridwansyah, dengan judul “Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh” masalah yang dikaji oleh Ridwansyah adalah tentang (1) legitimasi GAM sebagai partai. Dalam surat kantor wilayah hukum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk partai GAM harus ada kepanjangannya. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itu partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan nasional sebagaimana tertuang dalam point 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan pemerintah pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah, pihak Kanwil Hukum dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk mengubah lagi namanya. Pada tanggal 6-7 April 2008 diadakan rapat antara RI dan GAM serta CMI yang difasilitasi oleh IPI *Interpeace* di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Malek Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya PA, (2) Salah satu tujuan PA yang tercantum dalam AD/ART yang tertera. Maka secara teori apabila kita

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK, 2006).

lihat tujuan dari partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, Hak Minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, memperoleh otonomi, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, mencapai kemerdekaan, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah merdeka dan pembentukan negara baru. Tentunya point ketiga ini sudah dikunci dengan peraturan pemerintah No. 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.

E. Kerangka Teoritis

Kepercayaan sosial masyarakat Aceh pasca konflik terhadap partai lokal merupakan kerangka teoritis dalam membahas suatu strategi yang dilakukan oleh PA di Aceh, hingga melahirkan bagaimana penilaian atau persepsi masyarakat terhadapnya sebagai partai. Dan modal sosial apa saja yang akan di perbuat oleh PA sendiri selama ini.

1. Partai Politik Lokal Aceh

Hadirnya partai politik lokal di Aceh merupakan suatu proses memulihkan hak-hak masyarakat Aceh dalam berdemokrasi. Menurut Abdul Mukhtie, menjelaskan dalam buku tulisanya tentang “partai politik,” bahwa secara umum partai politik lokal merupakan partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa partai politik lokal merupakan

kumpulan dari sekelompok masyarakat yang jaringannya terbatas pada suatu daerah atau wilayah tertentu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara dengan cara yang sah.²⁰

Pada saat ini seperti kita ketahui daerah khusus Aceh, partai politik lokal diperkenankan hadir berdampingan dengan partai politik nasional. Keberadaan partai politik lokal ini sendiri merupakan realisasi dari negosiasi para aktor kebijakan untuk pemulihan hak sosial, ekonomi, hukum, politik dan sebagainya bagi masyarakat Aceh.²¹ Dan pembentukan partai politik lokal Aceh tercantum dalam nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM, juga pada landasan hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal Aceh,²²

2. Modal Sosial dan Demokrasi

Pada mula munculnya tentang kepercayaan sosial merupakan suatu respon peneliti terhadap semakin merengangnya hubungan antara individu-individu, atau kepedulian masyarakat antar sesama masyarakat. Sehingga kepercayaan sosial atau modal sosial tidak dapat dipisahkan dari setiap individu, demikian juga di dalam bernegara.

²⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), 65-66.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Ridwansyah, "*Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh.*" Kpmi, FH, 2018. <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id>. Diakses pada 23 Desember,2019. Pukul 23.00-00.23.

Menurut Robert Putnam modal sosial sendiri merupakan determinan (hubungan horizontal) pemerintah demokrasi yang efektif, hubungan horizontal yang di jelaskan oleh Putnam dimana antara individu-individu yang memiliki status dan kekuasaan sama didalam perkumpulan sukarela misalnya. Semakin banyak hubungan seperti itu didalam satu kawasan, semakin baik kinerja pemerintah kawasan itu. dan menunjuk pada kesimpulan pada studi komparatif ketika itu di *Itali* Putnam bahwa jaringan dapat hubungan suka rela merupakan kondisi krusial bagi pemerintahan demokratis yang kuat, stabil, responsif, dan efektif.

Putnam berpendapat kepercayaan sosial (*Sosial Trust*) yang di sebutnya sebagai modal sosial, merupakan variabel yang menghubungkan kepada perkumpulan dan kinerja demokrasi. Kepercayaan sosial sangat penting bagi sebuah masyarakat, menurut Putnam kepercayaan dapat membantu mengatasi dilemma-dilema tindakan kolektif, sehingga dapat menyelesaikan dilema tatanan publik yang fundamental. Warga yang memercayai dan layak dipercayai lebih dapat bekerja sama dengan satu sama lain atas dasar kesepakatan sukarela dari pada warga yang kurang saling percaya dan tidak mampu membuat komitmen yang menyakinkan. Artinya modal sosial sama seperti jaringan padat (tertutup) karena keterlibatan masyarakat akan menjaga kepercayaan umum karena jaringan tersebut akan mengancam individu-individu yang mementingkan diri sendiri, dengan demikian hukuman yang realistis karena meninggalkan komitmen

mereka.²³ Demikian juga dengan modal sosial inilah hadirnya partai politik lokal di Aceh.

Modal sosial akan terlihat ketika sekelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya pola hubungan sosial inilah yang menjadi dasar untuk mengatasi masalah secara kolektif. Dengan demikian, modal sosial salah satu sumberdaya sosial yang ada di masyarakat. Ketika masyarakat menyadari pentingnya sumberdaya sosial ini digunakan, maka akan membuat pembangunan menjadi efektif dan efisien.²⁴

Jhon Field mengatakan dengan jelas demikian: teori Modal Sosial, tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata, soal hubungan. Dengan membangun hubungan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu berkerja bersama-sama untuk mencapai bagaimana hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, atau yang dapat mereka capai tetapi dengan susah payah.

Sebagai kajian keilmuan yang serius, istilah Modal Sosial baru pertama kali muncul pada tahun 1916 ketika Lyda Hudson Hanifan menulis tentang *The Rural School Community Center*. Partisipasi dan kerja sama yang secara nyata ternyata bukan hanya tentang urusan ekonomi saja, akan tetapi tentang politik dan lain sebagainya. Mengacu pada Derek Armitage dan Ryan Plummer (2010), mekanisme penyesuaian diri lebih lanjut dikatakan sebagai mekanisme adaptasi.

²³Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, *Political Theory*, (London: Sage Publications, 2004), terj. Derta Sri Widowatie, (Jakarta, Lpip, 2013), 132-134

²⁴Jhon Field, *Sosial Capital*, Terj, Nurhaidi, Cet 2 (Yogyakarta: Kreasi, 2011), 103.

Mekanisme ini menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan sistem sosial secara sosial-ekologi untuk tetap siap dan tegap dalam menghadapi dan merespon perubahan dari faktor internal dan eksternal.²⁵

Menurut Francis Fukuyama, Modal Sosial sendiri adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Fukuyama juga berpendapat bahwa kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh didalam sebuah masyarakat yang di tunjukan oleh perilaku yang jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas atau dari masyarakat tersebut. Modal sosial bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil yang paling mendasar hingga kelompok-kelompok masyarakat paling besar dan dalam kelompok lain yang ada diantaranya, seperti partai, negara dan lain sebagainya.²⁶

3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik. (UU No. 22/1999)²⁷ menyebutkan bahwa “pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah, otonomi daerah juga telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal”. Setiap daerah

²⁵Kusumastuti, *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat PerDesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur*, Jurnal Sosiologi, 2015, 15-16.

²⁶Francis Fukuyama, *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terj. Ruslani, (Yogyakarta: Qalam, 2002), 80-82.

²⁷Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya. Dari segi potensi, keunggulan bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi atau pun anugrah sumber. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa desentralisasi akan terwujud dengan baik bisa dipengaruhi oleh karakteristik dari pemerintah daerah itu sendiri.²⁸ Desentralisasi fiskal dilihat dari perspektif administrasi publik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu negara, yaitu pencapaian nilai-nilai dan komunitas bangsa sehingga tercapai pemerintahan yang demokratis sebagai wujud dari otonomi. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal itu sendiri terdiri dari dua hal, pertama meningkatkan kesejahteraan lokal di dalam pemerintah daerah yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada tingkat nasional, kedua dengan keberhasilan tujuan pertama maka akan terciptanya instrumen politik pada tingkat lokal dimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bernegara.

Menurut Jimly Asshiddiqie Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam membahas konsep otonomi daerah dalam negara kesatuan adalah “pematangan konsep federalisme” (*federal arrangement*). Yang dimaksudkan dengan definisi pematangan tersebut adalah bentuk pengadopsian prinsip-prinsip federalisme dalam bentuk otonomi daerah di negara kesatuan karena sejatinya negara kesatuan sendiri tidaklah mengenal konsep otonomi karena semua kekuasaan

²⁸Rudy Hartanto agung nur probohodonu, Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah, universitas Sebelas Maret, Tahun 2008, 3620.

tersentralisasikan di pemerintahan pusat, daerah sendiri tidak lebih sekedar dari subordinasi dari pemerintah pusat.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Maka dalam sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang amat penting dalam untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian yang dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Secara Umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menuliskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Untuk mengecek validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, penulis juga menggunakan triangulasi teori. Sugiyono, menggunakan beberapa teori sebagai bahan penjelasan perbandingan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang paham dan mengerti tentang permasalahan penelitian ini.³⁰

²⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI, Jakarta: The Habibie Center, 2001, 28.

³⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), 61.

Makan jelas yaitu jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dilihat dari pendekatan analisisnya dan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kualitatif yaitu lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan ketentuan pada penggunaan logika ilmiah.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Partai Politik Partai Aceh atau PA, karena ini merupakan sumber utama data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel penelitian.³¹

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah *social trust* Masyarakat Aceh Tenggara Terhadap Partai Aceh (PA) dalam studi Persepsi Masyarakat Desa Kuta lang-lang Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data diantaranya adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang tentunya untuk memperoleh informasi.³² Demikian juga dalam metode ini bisa menjadi sumber data dalam penelitian dari *Stake Holder* yang menjadi penambah data dalam penelitian ini, seperti pemerintahan Desa Kuta lang-lang,

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

³² *Ibid*,

Pemuda dan Pemuda Desa, hingga Para Tokoh Desa yang memungkinkan menambah data penelitian.

b) Observasi

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Demikian juga bahwa observasi bisa dilakukan dengan kuisiner, rekaman gambar, dan rekaman suara.³³ Dalam metode ini peneliti sendiri lebih menekankan pada pengamatan di lapangan dan merekam kejadian apa saja yang ada semenjak sejarah Aceh hingga muncul konflik dan menjadikan hingar bingar pemilihan umum dan melihat dan meneliti bagaimana persepsi masyarakat Aceh Tenggara terhadap PA dan modal sosial apa saja yang sudah PA lakukan kepada masyarakat.

c) Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data deskriptif.³⁴ Yang dimaksud dalam data deskriptif tersebut adalah secara historisitas PA yaitu, bagaimana PA dalam mencapai modal sosial atau *social trust* kepercayaan masyarakat kepada PA Aceh Tenggara Desa Kuta lang-lang selama ini.

5. Analisis Data

Pada tahap ini merupakan suatu tahapan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan data pendukung lainnya

³³ Suharsiman Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 136.

³⁴ H.M. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), 274.

agar lebih memahamkan peneliti atas fenomena yang sedang di teliti. Maka dengan sehubungan dengan penelitian ini, data-data yang sudah terkumpul baik melalui dari observasi, wawancara, dokumentasi maupun data pendukung lainnya yang telah di dapatkan oleh peneliti di lapangan diurutkan sesuai dengan kategori atau pokok-pokok bahasan, sehingga berkaitan dengan hasil penelitian data lainnya.

Adapun tujuan dari analisis data ini adalah (1) Yaitu untuk mendeskripsikan *social trust* masyarakat Aceh Tenggara terhadap PA, (2) Untuk mendeskripsikan tentang persepsi masyarakat terhadap PA, (3) Untuk melihat capaian PA dalam membangun modal sosial di masyarakat Desa Kuta lang-lang Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara. (4) Bagaimana hasil pemilihan umum dari tahun ke tahun PA. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pada penelitian dilapangan yaitu di Desa Kuta lang-lang Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan disajikan dalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan dinamika dan historis partai politik lokal, implementasi kebijakan dan Undang-undang tentang peraturan pemerintahan Aceh oleh partai, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Membahas Partai Aceh dalam Bab ini juga dijelaskan politik masyarakat Aceh dan hubungan sejarah.

Bab III Bagaimana proses sosialisasi PA di masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat dan dalam menampung juga menerapkan aspirasi masyarakat Aceh Tenggara.

Bab IV Dalam Bab ini juga menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat di Aceh Tenggara terhadap peran dan fungsi PA sebagai partai politik lokal Aceh, dan dalam menampung juga menerapkan aspirasi masyarakat Aceh Tenggara.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai pada *social trust* masyarakat terhadap PA. Dan persepsi masyarakat Aceh Tenggara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat desa Kuta Lang-lang terhadap PA ialah, hanya kekecewaan terhadap PA. politisi Aceh yang mempunyai otoritas dalam menjalankan kebijakan, persepsi masyarakat terhadap PA sendiri yaitu masyarakat menjadi ajang pemanfaatan bagi para elit politik di saat momentum politik saja. Hingga masyarakat seolah-olah tidak lagi berharap kepada PA dan merasakan skeptisme, karena politik utopia saja yang di tawarkan oleh PA.

Namun dari faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pada pemilihan umum 2009 yang menghasilkan PA unggul di pemilihan tersebut. Dan seharusnya PA mampu menjadi lokomotif pada saat itu untuk perubahan di Aceh. Tapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan dan di harapkan oleh masyarakat desa Kuta Lang-lang. Dan juga pada pengimplementasi nilai-nilai yang telah disepakati antara pemerintahan RI dan GAM, yaitu butiran MoU Aceh pada 2005 di *helsinki* Finlandia. Bagi masyarakat desa Kuta Lang-lang yang mehendaki untuk direalisasi dari nota kesepahaman dan butiran-butir MoU 14 tahun yang lalu, faktanya tidak dan hanya terjadi perpecahan dan konflik pada setiap pemilihan umum berlansung di Aceh, secara psikologi hingga menimbulkan traumatis dimasyarakat.

Namun kepercayaan masyarakat terhadap PA sekarang ini dapat di lihat dari hasil pemilihan umum beberapa belakangan ini, hasil dari pemilihan legislatif dan

eksekutif misalnya pada 2009 suara untuk Partai PA memenangkan 46,91% suara di provinsi Aceh, dan untuk parlemen atau DPRA mendapatkan 33 kursi dari 69 kursi, maka PA waktu itu menjadi partai paling unggul. Sedangkan pada 2014 PA turun tajam hingga 35,3%, yaitu 29 kursi dari 81, meskipun ini cukup untuk pluralitas. Salah satu alasan penurunan suara adalah konflik partai internal yang terjadi sejak Februari 2011, yang menyebabkan beberapa anggota PA berangkat untuk membentuk PNA sebagai partai baru dan tandingan dari PA. Hanya saja PA memenangkan 29 di legislatif provinsi waktu itu. Namun pada 2019 ini PA juga masih mengalami penurunan cukup besar jumlahnya yaitu hanya mendapatkan 18 kursi, jumlah ini menurun jauh dibanding periode sebelumnya, yang mendapatkan 29 kursi. Meski demikian, partai lokal ini masih menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak.

Perolehan suara partai diketahui setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) merampungkan pleno rekapitulasi pada sidang pleno digelar di gedung DPR Aceh di Jl. Teuku Daud Beruh di Banda Aceh, dan selesai pada hari Senin 13 Mei 2019. Komisioner KIP Aceh membaca perolehan suara partai berdasarkan daerah pemilihan. Total ada 10 dapil di Aceh dari 23 kabupaten/kota. Dan di posisi kedua perolehan kursi terbanyak adalah Demokrat 10 kursi, disusul Golkar 9 kursi, Gerindra 8 kursi, PNA 6 kursi, PAN 6 kursi, PKS 6 kursi, PPP 6 kursi, PKB 3 kursi, PDA 3 kursi, NasDem 2 kursi, SIRA 1 kursi, Hanura 1 kursi, PDIP 1 kursi, PKPI 1 kursi.

Dan kepercayaan ini dipengaruhi oleh persepsi tentunya, dan sejauh ini kepercayaan sosial pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat di Aceh Tenggara

khususnya di desa Kuta Lang-lang kepada PA, belum dapat menjadi seperti partai harapan masyarakat untuk mewujudkan atau sebagai representatif dari wajah bernegara dan berdemokrasi pada umumnya seperti daerah lainya. Walaupun di nilai dari legitimasinya dan landasan hukumnya jelas sebagai partai lokal Aceh, tentunya basisnya secara regional Aceh saja. walaupun lingkup partai yang begitu khusus juga belum mampu menjadi sebuah partai yang seperti bayangan dan harapan masyarakat Aceh pada Awal keterlibtan PA pada pemilihan umum 2009 yaitu untuk mewujudkan cita-cita MoU. Walaupun sampai sekarang PA masih dominasi di DPR tingkat provinsi, namun belum ada kebijakan yang membuat masyarakat Aceh Tenggara khususnya di desa Kuta Lang-lang ini mengembalikan harapan pada 2009 untuk memilih kembali di pemilihan umum setelahnya.

Secara historis PA memang masih dianggap masyarakat secara umum GAM walaupun notabene adalah GAM yang mentransformasi menjadi lembaga partai politik. Dari historis, mungkin berimplikasikan pada relasi yaitu masyarakat Aceh Tenggara khususnya desa Kuta Lang-lang tidak ingin terulang kedua kali peristiwa kekerasan di masyarakat Aceh terjadi lagi, seperti dimasa trasisi demokrasi bangsa ini.

B. Saran

Hal yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan, justru akan membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai aspek tentang persepsi masyarakat terhadap partai politik lokal lainya di Aceh. Juga beragam

akan pembahasan sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk eksplorasi secara mendalam mengenai *social trust* masyarakat terhadap PA dalam tesis ini.

Maka Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk diwujudkan bagaimana merealisasikan, mengawasi, mengevaluasi nilai-nilai MoU yang telah di sepakati dan membangun pemikiran politik yang ideal di masyarakat tanpa harus syariat Islam menjadi alat untuk memenuhi nafsu para politisi di Aceh pada khususnya desa Kuta Lang-lang kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penyempurnaan keterbatasan tesis ini untuk peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfian, Ibrahim. *Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1987.
- Arikunto, Suharsiman. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bugin, H.M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dkk, Ainsyah. *Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional Di Indonesia, 1953-1964*, Lhokeumawe, Unimal Press, 2008.
- Effendy, Fenty. *Ombak Perdamaian Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015.
- F. Gaus, Gerald F. Gaus & Kukathas, Chandran. *Political Theory*, London: Sage Publications, 2004, terj. Derta Sri Widowatie, Jakarta, Lpip, 2013.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai politik dalam perkembangan sistem kenegaraan Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing 2006.
- Field, Jhon. *Sosial Capital*, Terj, Nurhaidi, Cet 2, Yogyakarta: Kreasi, 2011.
- Fukuyama, Francis. *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terj. Ruslani, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Hamzah, Murizal. *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publisbing, 2014.
- Karsayuda, M.Rifqinizamy. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

- Kawilarang, Harry & Hamzah. *Aceh; Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*.
- Nurhasyim, Moch. *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*, Jakarta: P2P LIPI, 2006.
- Pane, Neta S. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Patria, Nezar. *Aceh Merentas Jalan Damai Menuju Massa Depan*, Banda Aceh – Jakarta: Jyesta Publishing, 2009.
- Rudy, T. May. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Ed, Lili Rasjidi, Bandung: PT, Refika Aditama, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Stephen, Robbins, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2001.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. *Perlawanan Kaum Republik*. Pustaka Grafiti Press. 1990.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006.
- Thompson, Jhon B. *Kritik Ideologi Global*, Terj. Haqqul Yaqin, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Yusuf, Hasanuddin. *Teungku Mumammad Daud Berueh dan Perjuangan Pembontakan di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.

JURNAL

- Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah”, dalam *Jurnal Istinbath Hukum*, Vol. 13, Nomor 2, November Tahun 2016, 178.
- Anthony L. Smith, “*Aceh Democratic Times, Authoritarian Solutions*”, dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 December, 2002, 87.
- Bob Sugeng Hadiwinata, Linda Christanti dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Firdaus. *Peran ulama HUDA dalam politik pasca Orde Baru, rehab-rekonAceh Pasca gempa dan tsunami, pasca MoU Helsinki hinggasekarang*. Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry. 2010.
- M.Rifqinizamy Karsayuda, dengan Judul “Partai politik lokal di negara kesatuan: Upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Desember 2010. Post pada 2 juni 2011.

- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *The Application of Islamic Law in Indonesian: The Case Study of Aceh*”, Journal of Indonesian Islam, Vol. 01, Number 01, June 2007.
- Kusumastuti, *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat PerDesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur*, Jurnal Sosiologi, 2015.
- Michael Morfit, ”Aceh pasca tsunami dan pasca konflik” *Mengelola Risiko Aceh, kesepakatan Helsinki, dan perkembangan demokratis Indonesia*, Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), terj. Arif B. Prasetyo Bali-Jakarta, 2012.
- Misran, “*Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum*”, dalam Jurnal Legitimasi, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012.
- Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, (Jakarta: P2p-Lipu dan Pustaka Pelajar, 2008..
- Muhammad Alim, “*Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi*”, Jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2007, 120. Lihat juga, Abdul Gani Isa, “*Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh*”, Media Syariah, Vol XIV Januari-Juni 2012.
- Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Tahun VII, No.2, Juli – Desember 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*.
- Priyambudi Sulistiyanto, “*Whither Aceh?*”, dalam Jurnal Third World Quarterly, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001.
- Rani Lestari, DI / NII (Darul Islam / Negara Islam Indonesia)Sejarah Indonesia / 12 Mar, 2016.
- Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, LabSosio, Pusat Kajian Sosiologi Fisip UI, Agustus 2015.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute Democracy and Walfarism, 2011.

PAPER

Husien, Saddam. Dalam Seminar Nasional, Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Lauser, pada 02 Agustus 2017.

Fikar W. Eda, *Aceh Pasca-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Meninjau Kembali Qanun Aceh Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.

Muhammad Jafar, *Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

M.Isa Sulaiman. *Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. (Pustaka Al-Kautsar, 2000).

Wiratmadinata. *An evolving model for conflict transformation and Peacebuilding in Aceh*. AJRC, 2009.

Nashrun Marzuki & Warsidi. *Fakta Bicara; Mengungkap,*

PERATURAN

Anggaran dasar – Anggaran rumah tangga (AD- ART) Partai Aceh.

Hasil perhitungan Komisi Independen (KIP) Pemilihan Aceh Tenggara, 2019.

Mandat spesifik (khas) dari partai Aceh untuk memastikan implementasi MoU *Helsinki* secara konsisten dan komprehensif, sehingga menuju “Aceh Self Government”

MoU (Memorandum of Understanding) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Qanun Meukuta Alam Al Asyi merupakan adat istiadat dan norma-norma yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan stuktur pemerintahan warisan indatue yang lahir dari rahim adat dan budaya masyarakat Aceh.

UU No. 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*.

UUD No. 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*.

MEDIA DAN WEB

Aceh Institut Edward Aspinal, *Sejarah Konflik Aceh*, p.1, 2008. (http://www.AcehInstitute.org/resume_150607_edward_aspinal.htm).

Al Yasa Abubakar, *Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh*, dalam kumpulan tulisan, <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/>. Heyder Affan, BBC Indonesia, “Mereka menyoroti

penerapan syariat Islam di Aceh”, 18 Agustus, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150817_indonesia_gam_syariatislam

BBC Indonesia, Mereka menyoroti penerapan syariat Islam di Aceh Heyder Affan Wartawan, 18 Agustus, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150817_indonesia_gam_syariatislam.

Fokus.News.Viva.co.id, Penembakan misterius jelang pilkada Aceh. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/276464-penembakan-misterius-jelang-pilkada-aceh>.

Kompas.com, "Setelah 12 Tahun Perdamaian, Aceh Masih Dihantui Kemiskinan, <https://regional.kompas.com/read/2017/08/15/12460721/setelah-12-tahun-perdamaian-aceh-masih-dihantui-kemiskinan>. Penulis: Masriadi.

Kompas.com, Kapolri sebut motif penembakan Caleg Aceh persaingan antar partai. <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/04/1634119/Kapolri.Sebut.Motif.Penembakan.Caleg.Aceh.Persaingan.Antarpartai>.

Kompas.com, Nomor urut empat partai politik lokal Aceh di pemilu 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/08562741/ini-nomor-urut-empat-partai-lokal-aceh-di-pemilu-2019>.

Kompas.com, Nomor urut empat partai politik lokal Aceh yang ikut pemilu 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/08562741/>.

Koran Aceh kita, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007.

Malik, Pengertian Sosialisasi Politik Lengkap, “*Pengertian Sosialisasi Politik, Tipe-tipe dan sarana sosialisai politik*” <https://mengakujenius.com>. 11 November 2017.

Media Berita Aceh Online, Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus DPA Partai Aceh Periode 2018-2023 <http://acehonline.info/2018/04/resmi-dilantik-ini-susunan-pengurus-dpa-partai-aceh-periode-2018-2023/>.

Muhammad Ridwansyah, “*Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh.*” Kpmi, FH, 2018. <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id>. D

Partai Aceh yang di Sahkan di askes melalui, <http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai-Lokal-Disahkan.html>.

Peraturan.co.id, Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 “*Tentang Partai Politik.*”

Republika.co.id tentang data pertumbuhan ekonomi Daerah Aceh, Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamil menyatakan terus mengalami peningkatan. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/14>.

Republika.co.id. Tentang pertumbuhan ekonomi banda Aceh stabil pasca Tsunami, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah>. 2004.

Sejarah Partai Aceh, di akses <http://www.partaiAceh.com/2012/02/sejarah-partai-Aceh.html>, Waspada.co.id.

Sejarah Partai Aceh, di akses <http://www.partaiAceh.com/2012/02/sejarah-partai-Aceh.html>.

Sejarah Partai Aceh, <http://www.partaiAceh.com/2012/02/sejarah-partai-Aceh.html>.

Serambi Indonesia, *Manyusul Aceh. Partai Lokal Merabak*, Banda Aceh, 10 April 2008

Serambi Indonesia, *Partai Lokal Merabak, Banda Aceh*, 10 April, 2008.

SerambiNews.com, Muhammad Alkaf, Drama Pemberontakan ‘Dua Babak’

SerambiNews.Com, Musyawarah Besar (Mubes) Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) di Hotel Grand Nanggroe 28-30 November 2018. Kegiatan ini diikuti ratusan pengurus MUNA dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Viva.co.id, Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014, <http://nasional.news.viva.co.id>.

Waspada.co.id, Partai Aceh yang di Sahkan di akses melalui, <http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai-Lokal-Disahkan.html>.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh. “Partai Aceh.”

Wiratmadinata, Akar Konflik Internal Aceh; Dari Perang Cumbok Sampai Konflik Antara PA Dan PNA, The Aceh Institut, <https://acehinstitute.org/pojok-publik/politik/dari-perang-cumbok-sampai-konflik-antara-pa-dan-pna.html>

World Bank, *“Dampak Konflik, Tsunami dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh,”* 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, Amerika Serikat. Telp: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email: feedback@worldbank.org Website: www.worldbank.org. Januari 2008.

TESIS

Mahlil, *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Tesis Program Study Sosial Politik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Fitriani, *Kerterlibatan Ulama dalam Politik di Banda Aceh*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara, 2016.

Naidi Faisal, *Perubahan sikap politik Pemerintahan RI dan GAM Pasca Tsunami di Aceh,*” Tesis Pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

Nama : Mustapa Kamil Alga Beruh., S.sos., MA.
 Tempat/tgl. Lahir : Kuta Lang-Lang, 04. Mei 1995
 Alamat : Desa Kuta Lang-Lang Kecamatan Babel
 Kabupaten Aceh Tenggara
 Nama Ayah : Rajimin
 Nama Ibu : Almarhumah Sarimah
 EMAIL : mustapakamilbroeh@gmail.com
 No. HP : 082 365 733 654

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Lawe Hijo, tahun lulus 2007
 - b. SMPS Darul Iman, tahun lulus 2010
 - c. SMAS Darul Iman, tahun lulus 2013
 - d. S1 UIN Sumatera Utara, tahun lulus 2017

C. Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT Medan) periode 2016-2018
2. Kordinator Keumatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Medan) priode 2016-2017
3. Ketua Umum Forum Pemuda Kerukunan Masyarakat Melayu (FPKMM Medan) periode 2013-2014
4. Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa UIN-SU periode 2015-2016
5. Sekretaris Umum Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (SAPMA IPK DPD- Aceh Tenggara) 2016-2017
6. Ketua Umum Kita Bela Negara KBN Cabang Yogyakarta, periode 2017-2018

D. Minat Keilmuan : Kebijakan Publik

E. Karya Ilmiah :

1. Artikel

a. Jurnal UIN-SU, Judul : Aceh dalam dasawarsa Perdamaian



Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Mustapa Kamil Alga Beruh., S.sos. MA.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara dengan Kuecik (Kepala Desa) Kuta Lang-Lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Tanggal 25 Mei 2019.



Wawancara dengan Calon Legislatif DPR Provinsi Yahdi Hasan Ramud dari Fraktisi Partai PA dan di dampingi oleh Pengurus Relawan Pemuda Partai Aceh, Ramadhan Desky, Farma Hardiansyah dan Hendra



Wawancara dengan Edi Hardianto Broeh, Pemuda, sebagai tokoh pemuda desa Kuta Lang-Lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Tanggal 23 Mei 2019. Di Aceh Tenggara.



Wawancara dengan Spariadi Selian, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Tenggara Prioderisasi 2018-2023. Pada Tanggal 22 Mei 2019. Di Aceh Tenggara.



Wawancara dengan Ramadhan Desky, Tokoh Pemuda dan Relawan Pemuda Partai Aceh (RPPA DPW-PA) Aceh Tenggara, Pada Tanggal 8 Mei 2019.



Wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh Tenggara,



Wawancara dengan ulama kharismatik Aceh Tenggara yang tergabung dalam MPU Aceh Tenggara.

Dokumentasi diskusi dan wawancara dengan Bupati Aceh Tenggara.



Dokumentasi diskusi dan wawancara dengan Wakil Bupati Aceh Tenggara.



Dokumentasi kegiatan pemuda dan pemudi Desa Kuta Lang-Lang Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.





Sekretariat Relawan Pemuda Partai
Aceh RPPA DPW-PA Aceh Tenggara.
Jl. Kumbang Indah. No.12. Kecamatan
Badar Kabupaten Aceh Tenggara.



Sekretariat Pemenangan DPW-PA Aceh
Tenggara. Jl. Kutambaru kecamatan
Lawe Bulan, Kabupaten Aceh
Tenggara.



Sekretariat DPW-PA Aceh Tenggara.
Jl. Medan-Kuta Cane Aceh Tenggara
No. 01. Kecamatan Babusalam
Kabupaten Aceh Tenggara.

